|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian  | : | Metro Sulawesi  | KasubaudSulteng II |
| Hari, tanggal | : | Minggu, 30 Agustus 2015 |
| Keterangan | : | Kadisdikpora Tersandung Kasus Penyerobotan Lahan Sekolah |
| Entitas | : | Touna |

**Ampana, Metrosulawesi.com –** Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Tojo Unauna (Touna) Surya Maloni, dilaporkan warga Ampana, Hadijah (70) ke Polres setempat terkait ganti rugi lahan pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sabulira yang terletak di Desa Sabulira Toba, Kecamatan Ratolindo .

Hadijah yang merupakan pemilik lahan sengketa tersebut datang ke Polres didampingi Ketua LSM Merah Putih Habib Muhamad, Rabu (26/8/2015). Mereka diterima tim penyidik  Aiptu Imran dan Bripda I Wayan Eko.

Dalam keterangan yang diberikan Hadijah, berdasarkan surat keterangan  yang dikeluarkan oleh  Kepala Desa Sabulira Toba, Arifin Ruru  pada tanggal 28 Oktober 2013. Nomor: 594/468/ST-X/2013 menyebutkan, dalam suratnya bahwa Rahim (Alm) adalah penduduk Desa Sabulira Toba, benar memiliki sebidang tanah yang dihibahkan kepada SDN Sabulira oleh Bapak Hasan Terne Nori (Alm) sejak tahun 1974 sampai sekarang,  dengan ukuran luas kurang lebih 50 m x 49 m = 2,450m2.

Disebutkan dalam surat keterangan tersebut, sebagai ahli  waris tanah  Hadijah meminta ganti rugi atas lahan yang  sesungguhnya bahwa lokasi SDN Sabulira itu benar-benar bersengketa, sesuai surat keterangan hibah yang ada dengan ukuran  lokasi yang bersengketa adalah panjang 43 meter dan  lebar 12 meter. Dan diatas lahan hibah itu sudah dibangun Ggdung belajar  dua lokal oleh Dinas Dikpora Touna.

"Saya sudah 7 tahun Mmncari keadilan untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut,  tapi  belum ada respon dari dinas terkait. Oleh karena itu, tanah itu akan kami ambil kembali untuk bangun rumah,” kata  Hadijah kepada Metrosulawesi, Kamis (27/8/2015).

Ketua LSM Merah Putih  Habib Muihamad yang diberi kuasa atas sengketa tanah tersebut mengatakan, tanah tersebut akan ditarik kembali  untuk dibangun rumah oleh Hadijah  dan tidak untuk dijual.

"Karena penawaran ganti rugi lahan itu dari Kadis Dikpora hanya meminta 3.500 permeter, dan harga tersebut tidak wajar dan itu tidak akan mencukupi untuk membeli kembali lahan pengganti untuk mereka membangun rumah mereka. Sedangkan saat ini mereka tidak memili rumah sendiri, dan itu untuk apa, oleh sebab itu kami melapor ke polisi dan kami minta Polres Touna untuk memproses secepatnya dan ini harus menjadi perhatian bagi polisi,” tegas Habib Muhamad.

Kepala Dinas Dikpora Touna yang coba dikonfirmasi melalui  telepon selulernya tidak memberi jawaban. Namun, sebelumnya Metrosulawesi telah  mendatangi Dikpora pada Mei 2015 silam, saat gedung sekolah tersebut pasangi spanduk  yang bertuliskan " Lahan ini milik kami"  oleh pemilik tanah  Hadijah.

Ditemui  diruang kerjanya waktu itu, Kadis Dikpora Surya Maloni mengaku, bahwa Dikpora siap membayar ganti rugi lahan yang  telah dibangun sekolah.

 “Tanah hibah itu baru diketahui setelah Dikjar melakukan pengukuran kembali lokasi sekolah,  kalau tidak dilakukan  pengukuran, maka kelebihan lahan itu tentu tidak diketahui, memang sebagian tanah yang  dihibahkan masuk dalam rehabilitasi  bangunan sekolah itu. Namun  kami akan memverifikasi siapa pemilik lahan yang sah dan itu harus ada surat asal usul tanah tersebut,” kata  Surya Maloni.

Ia menambahkan, masalah sengketa lahan sekolah itu sudah terjadi sejak lima tahun lalu, saat dirinya belum menjabat sebagai Kadis Dikpora. Dan pihak dinas saat itu sudah berusaha menawarkan pembayaran tanah, tapi harus dibayarkan  sesuai dengan NJOP. Namun karena permintaan ahli waris terlalu tinggi akhirnya batal.

"Mereka menawarkan  150 juta, dengan permintaan ganti rugi yang terlalu tinggi itu, kami tentu tidak bisa memenuhi permintaan itu karena lahan  lokasi sekolah itu  harus dilihat dulu disesuaikan NJOP. Sebenarnya anggaran pembebasan lahan untuk sengketa gedung SD tersebut sudah tersedia, tapi perlu proses untuk membayarnya. Dan itu kalau dilihat sesuai NJOP, kami bisa taksirkan dan dibayarkan  sekitar 20 juta,”  kata Kadis Dikpora saat itu.